

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum; Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Gunung Agung.

Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Cetakan Kedua Belas, Jakarta: Djambatan.

Chainur Arrasjid, 2006, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar

Dominikus Rato, 2017, *Pengantar Filsafat Hukum (Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum)*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2015, *Pedoman Penulisan Tesis*.

Farida Patittingi, 2012, *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil di Indonesia. Studi atas Penguasaan dan Pemilikan Tanah*, Yogyakarta: Rangka Education.

Grafika.Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Empat*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Hamzah Halim, 2015, *Cara Praktis Memahami & Menyusun Legal Audit dan Legal Opinion*, Jakarta: Kencana.

Indrohato, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2008, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Bandung: Nuansa.



ik Saleh, 1990, *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Samun Ismaya, 2011, *Pengantar Hukum Agraria*, Edisi 1, Yogkarta: Graha Ilmu.

Krismartini dan Burhan Bungin, 2019, *Wilayah Pesisir Indonesia : Narasi Kebijakan Publik Masalah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia*, Edisi Pertama, Jakarta : Kencana.

Kuswartojo T dan Salim. 1997, *Perumahan dan Permukiman yang Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

La Sara, 2014, *Pengelolaan Wilayah Pesisir, Gagasan Memilih Aset Pesisir dan Solusi Pembangunan Bangsa*, Bandung: Alfabet.

Luky Adrianto, et al, 2015, *Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

M. Basrowi, 2019, *Masyarakat Pesisir*, Semarang : Mutiara Aksara.

Rokhmin Dahuri dkk, 2013, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu*, Jakarta: Balai Pustaka.

Salim H. S. dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum sebuah pengantar*, Edisi ke-2 Cet. 6, Yogyakarta: Liberty.

Suryanti, Supriharyono, Sutrisno Anggoro, 2012, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu*, Semarang: Universitas Diponegoro Press.

Stout HD, 2004, *de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni.

Tim Penyusun Pedoman Direktorat Pesisir dan Lautan, Ditjen KP3K, DKP, 2007, *Pedoman Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Pesisir dan Laut*, Jakarta: DKP.



Urip Santoso, 2009, *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana.

_____, 2012, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana.

Waskito dan Hadi Arnowo, 2017, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*. Ed. 1, Jakarta: Kencana.

JURNAL DAN PENELITIAN HUKUM

A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, 2018, *Teori Kepemilikan Tanah*, Yogyakarta, Prosiding Seminar Nasional Hak Kekayaan Intelektual dan Pertanahan.

Achmad Fama, 2016, *Komunitas Masyarakat Pesisir di Tambak Lorok*, Semarang, Jurnal Sabda Vol. 11 No. 2.

Alreiga Referendiza Wiraprama, Zakaria, Ari Widyati Purwantiasning, 2014, *Kajian Pola Permukiman Dusun Ngibikan Yogyakarta Dikaitkan Dengan Perilaku Masyarakatnya*, Jurnal Arsitektur NALARs Volume 13 No 1.

Farida Patittingi, 2013, *Prinsip Keadilan Sosial dalam Sistem Tenurial di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indonesia*, BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, No. 38 Tahun 12.

Finie Opaoline Eka Putri, 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertipikat Terhadap Sertipikat Yang Cacat Administrasi*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2020

Makhfud Efendy, 2009, *Solusi Pemanfaatan Ruang, Pemanfaatan Sumberdaya Dan Pemanfaatan Kapasitas Asimilasi Wilayah Pesisir Yang Optimal Dan Berkelanjutan*, Jurna Kelautan Vol. 2 No. 1.

Muhammad Ilham Arisaputra, 2015, *Penguasaan Tanah Pantai dan Wilayah Pesisir di Indonesia*, Perspektif Hukum, Vol. 15 No. 1.



itorus, Mitra Wulandari, Eri Khaeruman, 2021, *Ketidakefektifan engaturan Penguasaan Tanah di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau ecil*, BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, Vol. 7 No. 1.

Rohim Dahuri, 1998, *Kebutuhan Riset Untuk Mendukung Implementasi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu*, Jurnal Pesisir Dan Lautan (*Indonesian Journal Of Coastal And Marine Resources*) Vol. 1, No. 2.

Samir, *Status Hukum Tanah Hasil Reklamasi Untuk Kawasan Permukiman Masyarakat di Pulau Bungin Nusa Tenggara Barat*, Tesis, Fakultas Hukum Univesitas Hasanuddin, 2021.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.



an Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 10/Men/2003 tentang Pedoman Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2018
Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2038

Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Bau-Bau Tahun 2014 - 2034

WEBSITE

<https://www.kompasiana.com/>, Hamzah Palalloi, Bau-Bau, Pulau Makasar
dan Cerita Masa Lalu.



LAMPIRAN

Lampiran 1.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS HUKUM
KAMPUS TAMALANREA JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245 TELP : (0411) 584 686, 587 219 e-mail : hukum@unhas.ac.id	
Nomor : 105/UN4.5.1/PT.01.04/2024	08 Januari 2024
Lampiran : Proposal	
Hal : Permohonan Izin Penelitian	
Yth. : Kepala Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Baubau di Baubau	
Dengan hormat, dalam rangka penyusunan dan penulisan Tesis (S2) Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, kiranya mahasiswa tersebut dibawah ini:	
Nama	: Khaeran Nur Miftahul Janna
Nomor Pokok	: B022192012
Program	: Magister (S2) Kenotariatan
Judul Penelitian	: Status Penguasaan Tanah Masyarakat Pesisir Pada Pulau Makassar Di Kota Baubau
Penasihat	: Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. Pembimbing Utama Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum. Pembimbing Pendamping
Waktu Penelitian	: Januari 2024 s.d. Selesai
Mohon bantuan kemudahan proses pengambilan data dan informasi untuk kepentingan penyelesaian studi mahasiswa yang bersangkutan.	
Atas perkenaan dan bantuan saudara diucapkan terima kasih.	
 Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. NIP. 19761129 199903 1005	
Tembusan	
1 KPS S2 Kenotariatan Fakultas Hukum Unhas	
2 Sdr. Khaeran Nur Miftahul Janna	
3 Arsip	



Lampiran 2.



PEMERINTAH KOTA BAUBAU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Dayanu Ikhsanuddin Nomor. 1, Betoambari, Baubau, Sulawesi Tenggara 93721
Telp. (0402) 2824536 Pos-el: pupr@baubaukota.go.id

Baubau, 19 Januari 2024

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Baubau menerangkan bahwa:

Nama : Khaeran Nur Miftahul Janna
Nomor Pokok : B022192012
Program : Magister (S2) Kenotariatan Universitas Hasanuddin
Judul Penelitian : Status Penguasaan Tanah Masyarakat Pesisir Pada Pulau Makassar Kota Baubau

Dengan ini menyatakan bahwa nama mahasiswa tersebut di atas **BENAR** telah melaksanakan penelitian di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Baubau.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya

KEPALA DINAS



Optimized using
trial version
www.balesio.com

Scanned with CamScanner

Lampiran 3.

1/18/24, 4:15 PM

PDF viewer



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Jalan Siawangkati No. 9 Kota Bau bau Telp. (0402)- email kot-baubau@slrbpn.go.id

SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN

Nomor : 69/SKet-74.72.UP.02.03/I/2024

Kepala Kantor Pertanahan Kota Baubau menerangkan bahwa :

Nama : Khaeran Nur Miftahul Janna
Nomor Pokok : B022192012
Jenis Kelamin : Perempuan
Program : Magister (S2) Kenotariatan
Judul : "Status Penguasaan Tanah Masyarakat Pesisir Pada Pulau Makassar Di Kota Baubau"

Benar-benar telah melakukan Penelitian pada Kantor Pertanahan Kota Baubau. Pada tanggal 18 Januari 2024. Berdasarkan surat izin penelitian dari Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum, Nomor 105/UN4.5.1/PT.01.04/2024 tanggal 08 Januari 2024.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Baubau, 18 Januari 2024

**Kepala Kantor Pertanahan
Kota Baubau,**

Telah Ditandatangani Secara Elektronik

**Dr. ASMANTO MESMAN, S.Si, M.M
NIP. 197402021994031003**



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN menggunakan sertifikat elektronik BSR, BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku

Melayani, Profesional, Terpercaya

1/1

latrbpn.go.id/TandaTanganElektronik/SudahTTE

1/1



CS Dipindai dengan CamScanner

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Lampiran 4.



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Baubau

Lampiran 5.



Wawancara di Kantor Pertanahan Kota Baubau

Lampiran 6.



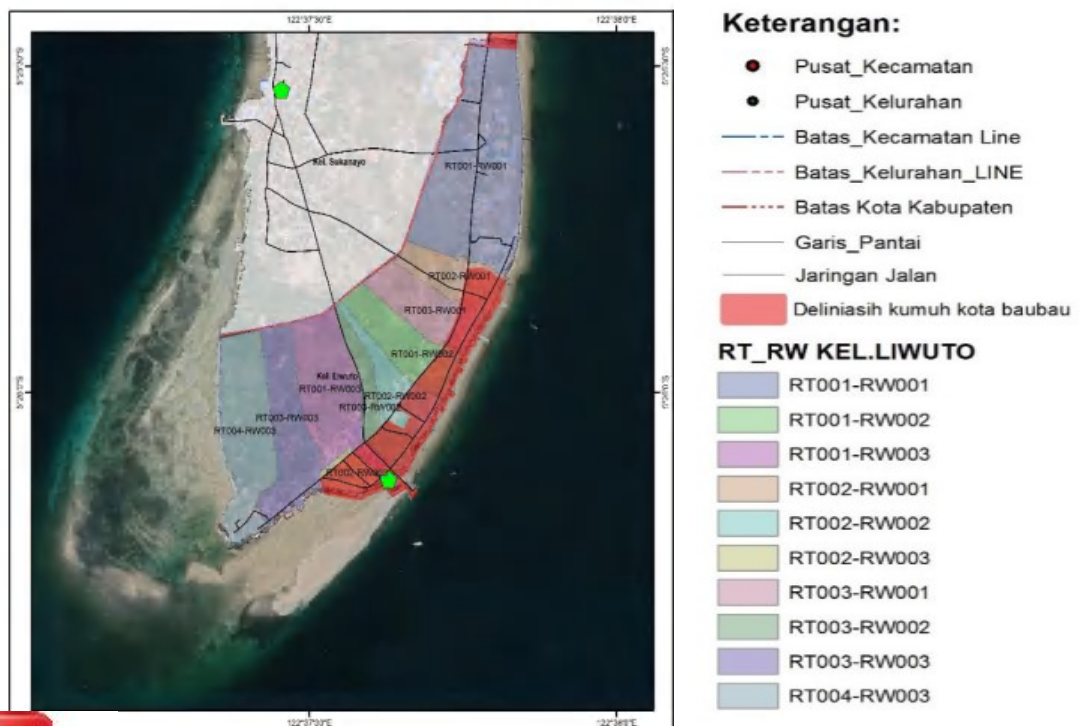
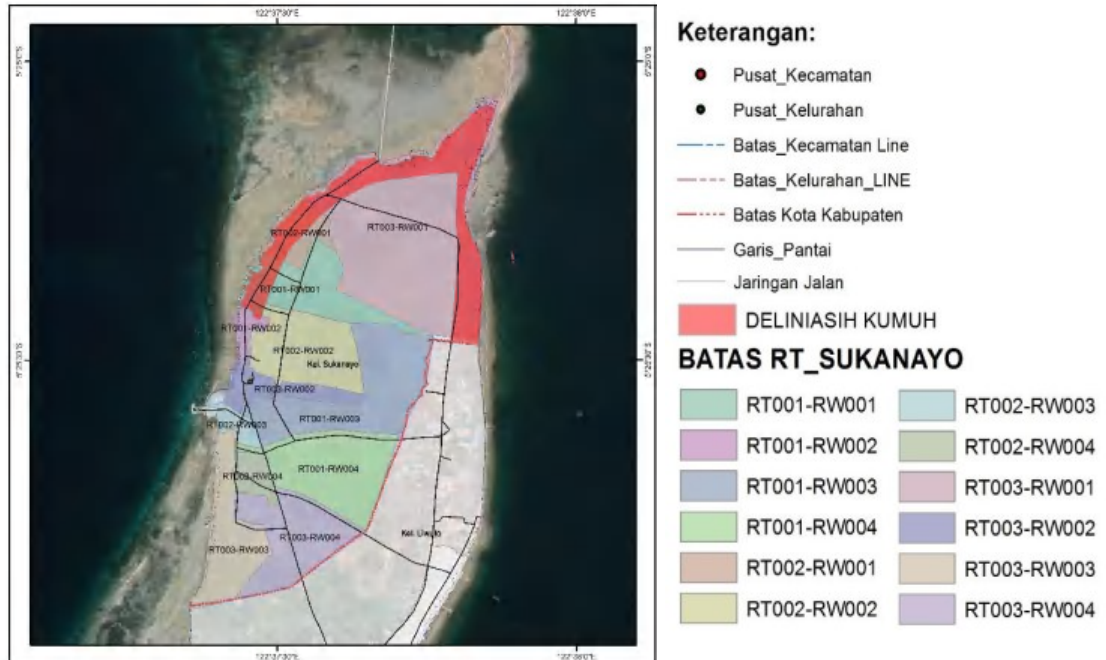
Wawancara dengan Masyarakat Pulau Makassar



Pesisir Pantai Pulau Makassar



Lampiran 7.



kiman Kel. Sukanayo dan Kel. Liwuto yang masuk kawasan kumuh